

BPK RI Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPD Enam Entitas

Pontianak, BERKAT.

BPK RI menyerahkan Hasil Pemeriksaan (HP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (LKPD) TA.2010 kepada enam entitas, Kamis (30/6). Keenam entitas yakni Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sintang, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Humas BPK RI Perwakilan Kalbar, Sigit mengatakan, berdasar hasil pemeriksaan terhadap enam entitas tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Kabupaten

Pontianak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang, dan Kota Singkawang serta opini Tidak Wajar (TW) untuk Kabupaten Kubu Raya.

Menurut dia, beberapa permasalahan yang ditemukan BPK RI dalam pemeriksaannya dan mempengaruhi opini masing-masing entitas diantaranya, pada Kabupaten Pontianak terdapat permasalahan mengenai pengelolaan persediaan barang pakai habis belum memadai dan penambahan aset tetap sebesar Rp9.036.701.959,0 tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ia menuturkan, Kabupaten Sintang ditemukan adanya permasalahan sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap sebesar Rp95.534.016.330,96 belum memadai dan temuan mengenai persediaan obat-obatan dan dokumen kependudukan pada neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.087.637.448,00 tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Kabupaten Sanggau, lanjut Sigit, masih ditemukan permasalahan mengenai penyajian piutang pajak daerah sebesar Rp202.531.769,00 pada neraca per 31 Desember 2010 tidak andal dan penyajian

aset tetap senilai Rp741.505.460.519,64 pada neraca per 31 Desember 2010 tidak andal. Sementara itu, kata Sigit, Kabupaten Ketapang masih ditemukan permasalahan aset tetap pada neraca per 31 Desember 2010 belum disajikan secara wajar dan Investasi non permanen ternak bergulir dalam neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.014.150.819,00 belum menggambarkan nilai wajar.

"Kemudian pada Pemkot Singkawang masih ditemukan permasalahan diantaranya penyajian investasi dana bergulir sebesar Rp2.739.834.185,00 pada neraca per 31 Desember 2010 tidak dapat diyakini," ujarnya. Sigit menambahkan, untuk Kabupaten Kubu Raya memperoleh opini TW karena masih ditemukan beberapa permasalahan. (del)